



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN
IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penegasan pengaturan impor hewan dan produk hewan serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API, harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. Akte Pendirian Usaha beserta perubahannya;
 - b. NIB yang berlaku sebagai API;
 - c. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang

tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; dan

- e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(1a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Jenis Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:
- a. Akte Pendirian Lembaga bagi Lembaga sosial atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan bagi perwakilan negara asing/lembaga internasional;
 - b. NIB;
 - c. bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) terhadap impor produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk ataupun produk olahan lainnya yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin; dan
 - d. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
- (2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sosial dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional juga harus melampirkan:
- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau

- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUMN harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. Surat Penugasan dari Menteri BUMN; dan
 - c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memuat informasi paling sedikit mengenai:

- a. nomor dan tanggal Persetujuan Impor;
 - b. nomor dan tanggal Rekomendasi;
 - c. nama, NIB, dan alamat pelaku usaha;
 - d. nomor dan tanggal surat permohonan Persetujuan Impor;
 - e. negara asal;
 - f. pos tarif/HS dan uraian produknya termasuk jumlah per kode HS;
 - g. pelabuhan tujuan;
 - h. tujuan penggunaan; dan
 - i. masa berlaku Persetujuan Impor.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 16 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Importir wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, atau Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Persetujuan Impor.

(2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

(2b) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a atau huruf b diperlukan sepanjang elemen data yang berubah dalam NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, dan Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan elemen data yang juga tercantum dalam Rekomendasi.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai:
 - a. uraian barang;
 - b. Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. negara asal;
 - e. pelabuhan tujuan; dan
 - f. tujuan penggunaan.
- (2) Importir harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan melampirkan Persetujuan Impor.

(2a) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir juga harus melampirkan:

- a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian terhadap Impor Produk Hewan Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis,

secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), Direktur Impor atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) tidak lengkap dan tidak benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling

lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Produk Hewan yang diimpor wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Produk Hewan yang diimpor yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan keterangan halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan keterangan tidak halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (6) Importir wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan atas Jenis Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ditujukan untuk keperluan umum yang menggunakan penanganan rantai dingin dan

keperluan khusus yang menggunakan penanganan rantai dingin.

- (2) Keperluan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi hotel, restoran, katering, industri, pasar, dan/atau tempat lain.
- (3) Keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor dicabut apabila Eksportir atau Importir:

- a. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor;
- b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor jenis Hewan dan Produk Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);

- d. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor atau perubahan Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - e. terbukti mengubah kesesuaian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor atau perubahan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - f. dikenai sanksi pencabutan Rekomendasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh instansi penerbit Rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; dan/atau
 - h. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan/atau instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
 - a. barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

- b. barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang; dan/atau
 - d. barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,
dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Jenis Hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:
- a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - b. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram,
harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 ayat (2a) huruf a atau huruf b.
9. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Laporan Surveyor untuk Impor Produk Hewan Olahan dengan Pos Tarif/HS 16.02 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan impor.

Pasal 37B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Impor Produk Hewan Olahan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 16.02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1095

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN

IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
1.	ex. 0101.21.00	-- Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi:	
2.	0102.21.00	-- Bibit	
		- Kerbau:	
3.	0102.31.00	-- Bibit	
4.	0102.39.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup.	
5.	ex. 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak
		- Lain-lain:	
6.	0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	
7.	0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.	
	0104.10	- Biri-biri :	
8.	ex. 0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Woli/Bulu
9.	0104.10.90	-- Lain-lain	
	0104.20	- Kambing :	
10.	ex. 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
11.	0104.20.90	-- Lain-lain	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
12.	ex. 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.13	-- Bebek :	
13.	ex. 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus</i>	

		<i>domesticus</i> :	
14.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
15.	ex. 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung :	
16.	ex. 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
17.	0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu	
		- Lain-lain:	
	0511.99	-- Lain-lain:	
18.	ex. 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN

IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN YANG DIATUR IMPORNYA

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi:	
1.	0102.21.00	- - Bibit	
		- - - Sapi jantan:	
2.	ex. 0102.29.19	- - - - Lain lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif
3.	ex. 0102.29.90	- - - Lain lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
4.	0101.21.00	- - Bibit	
		- Kerbau :	
5.	0102.31.00	- - Bibit	
6.	ex. 0102.39.00	- - Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata- rata maksimal 450 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
	01.03	Babi hidup.	
7.	0103.10.00	- Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.	
	0104.10	- Biri-biri:	
8.	0104.10.10	- - Bibit	
	0104.20	- Kambing :	
9.	0104.20.10	- - Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	
		- Berat tidak lebih dari 185 g :	
	0105.11	- - Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
10.	0105.11.10	- - - Ayam bibit	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	0105.13	- - Bebek.	
11.	0105.13.10	- - - Bebek bibit	
		- Lain-lain :	
	0105.94	- - Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
12.	0105.94.10	- - - Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui :	
13.	ex. 0106.14.00	- - Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
14.	ex. 0106.39.00	- - Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN

IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS PRODUK HEWAN YANG DIATUR IMPORNYA

A. Produk Hewan dari Jenis Lembu

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
1.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
2.	ex. 0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i> <i>Rump & Loin</i> <i>T-Bone Steak</i> <i>Short Ribs</i> <i>OP Ribs/Ribs Prepared</i>	Has Pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga pendek Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/Ribs</i> <i>Spare Ribs</i> <i>Back Ribs</i> <i>Konro Ribs</i> <i>Neck Meat</i> <i>Bone in</i> <i>Shink/Shank</i>	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
3.	ex. 0201.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin</i> <i>Side Strap</i> <i>Off</i> <i>Tenderloin/</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Side Strap Off</i>	dengan anakan
				<i>Butt tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/Cold</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufact uring Meat</i>	<i>Trimnings 65sampai dengan 95- CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95- CL
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
4.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
5.	ex. 0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i> <i>Rump & Loin</i> <i>T-Bone Steak</i> <i>Short Ribs</i> <i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i> <i>Brisket/ Short plate</i>	Has pendek Has dan Tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang Lamusir utuh Lamusir utuh bertulang dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/ Ribs</i> <i>Spare Ribs</i> <i>Back Ribs</i> <i>Konro Ribs</i> <i>Neck Meat Bone in</i> <i>Shink/ Shank</i>	dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang
6.	ex. 0202.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i> <i>Tenderloin</i> <i>Butt Tenderloin</i> <i>Striploin/ sirloin</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar
				<i>Cuberoll/Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/Clod</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Daging Industri (<i>manufacturing meat</i>)	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling
				<i>Diced/block Beef</i>	Daging balok/dadu
				<i>Topside/Inside</i>	Penutup Utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
7.	ex. 0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss special</i>
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru-paru
				Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in /</i> dengan	<i>Tail (6070/V 6561)</i>
			<i>Tailpieces</i>		Potongan Buntut
			<i>Feet</i>		Kaki

NO	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Tulang		
		- Dari binatang jenis lembu, beku :			
8.	ex. 0206.21.00	--Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge- longcut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge- short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge- short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah
9.	0206.22.00	--Hati		-- <i>Livers</i>	
10.	ex. 0206.29.00	--Lain- lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/</i> dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
				<i>Feet</i>	Kaki

B. Produk Hewan dari Jenis Selain Lembu

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
3.	0203.19.00	--Lain-lain	
		-Beku :	
4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
6.	0203.29.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:	
8.	0204.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
10.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
11.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
12.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
13.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
14.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
15.	ex. 0204.50.00	-Daging Kambing	Goat carcass
16.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
17.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin	
		- Dari babi, beku :	
18.	0206.41.00	-- Hati	
19.	0206.49.00	-- Lain-lain	
20.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin	
21.	0206.90.00	- Lain-lain, beku	
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
22.	0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, segar atau dingin	
23.	0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, beku	
24.	02.07.13.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.14	--Potongan dan sisanya, beku	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	0207.14.10	--Sayap	
26.	0207.14.20	--Paha	
27.	0207.14.30	--Hati	
		---lain-lain :	
28.	0207.14.91	---daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
29.	0207.14.99	----Lain-lain	
		-Dari kalkun :	
30.	ex. 0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
31.	ex. 0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
32.	0207.26.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.27	--Potongan dan sisanya, beku	
33.	0207.27.10	---Hati	
		---Lain-lain :	
34.	0207.27.91	----Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
35.	0207.27.99	---- Lain-lain	
		-Dari bebek:	
36.	ex. 0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
37.	ex. 0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian- bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
38.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
39.	0207.44.00	--Lain-lain, segar atau dingin	
40.	0207.45.00	--Lain-lain, beku	
		- Dari angsa :	
41.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	
42.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	
43.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin	
44.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin	
45.	0207.55.00	-- Lain-lain, beku	
46.	0207.60.00	- Dari ayam guinea	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
47.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>	
48.	0208.30.00	- Dari primata	
49.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	
50.	0208.90.10	-- Kaki kodok	
51.	ex. 0208.90.90	-- Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kangguru

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.	
52.	0209.10.00	- Dari babi	
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
		- Daging babi :	
53.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
54.	0210.12.00	-- Perut (<i>streaky</i>) dan potongannya	
	0210.19	-- Lain-lain :	
55.	0210.19.30	--- Bacon atau paha, tanpa tulang	
56.	0210.19.90	--- Lain-lain	
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan :	
	0210.99	-- Lain-lain :	
57.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan	
58.	0210.99.90	--- Lain-lain	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
		--Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
59.	0407.11.10	---Untuk bibit	
60.	0407.11.90	---Lain-lain	
	0407.19	-- Lain-lain:	
		---Dari bebek:	
61.	0407.19.11	---- Untuk bibit	
62.	0407.19.19	---- Lain-lain	
		---Lain-lain:	
63.	0407.19.91	----Untuk bibit	
64.	0407.19.99	----Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
65.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.29	--Lain-lain :	
66.	0407.29.10	--- Dari bebek	
67.	0407.29.90	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
68.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
69.	0407.90.20	-- Dari bebek	

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
70.	0407.90.90	-- Lain-lain	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
71.	ex. 0511.10.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
		-Lain-lain:	
	0511.99	--Lain-lain	
72.	ex. 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN

IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS PRODUK HEWAN OLAHAN YANG DIATUR IMPORNYA

No	POS TARIF / HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
PRODUK HEWAN OLAHAN			
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	
1.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu	
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
2.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
3.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
4.	0402.10.49	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
5.	0402.10.91	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
6.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
7.	0402.10.99	---Lain-lain	
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
8.	0402.21.20	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	
9.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
10.	0402.21.90	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
11.	0402.29.20	---Dalam kemasan dengan berat	

		bersih 20 kg atau lebih	
12.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	
13.	0402.29.90	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
14.	0402.91.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
15.	0402.99.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	
	0403.10	-Yoghurt:	
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:	
16.	0403.10.21	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
17.	0403.10.29	---Lain-lain	
18.	0403.10.91	---Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	
19.	0403.10.99	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
20.	0403.90.10	--Susu mentega	
21.	0403.90.90	--Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	
22.	0404.10.10	--Dalam bentuk bubuk	
23.	0404.10.90	--Lain-lain	
24.	0404.90.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i> .	
25.	0405.10.00	-Mentega	
26.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>	
	0405.90	-Lain-lain :	
27.	0405.90.10	--Lemak mentega anhidrat	
28.	0405.90.20	--Minyak mentega	
29.	0405.90.30	--Ghee	
30.	0405.90.90	--Lain-lain	

	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
31.	0406.10.10	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
32.	0406.10.20	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:	
33.	0406.20.10	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
34.	0406.20.90	--Lain-lain	
35.	0406.30.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
36.	0406.40.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
37.	0406.90.00	-Keju lainnya	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
38.	0408.11.00	-- Dikeringkan	
39.	0408.19.00	-- Lain-lain	
		-Lain-lain :	
40.	0408.91.00	-- Dikeringkan	
41.	0408.99.00	-- Lain-lain	
42.	0409.00.00	Madu alam	
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
43.	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
44.	1601.00.90	-Lain-lain	
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	16.02.10	- Olahan homogen:	
45.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
46.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
47.	ex. 1602.20.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		- Dari unggas dari pos 01.05 :	
	1602.31	-- Dari kalkun:	
48.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
		--- Lain-lain :	

49.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
50.	1602.31.99	---- Lain-lain	
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus :	
51.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
52.	1602.32.90	--- Lain-lain	
53.	1602.39.00	-- Lain-lain	
		- Dari babi:	
54.	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
55.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
56.	1602.41.90	--- Lain-lain	
57.	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
58.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
59.	1602.42.90	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
60.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
61.	1602.49.19	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
62.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
63.	1602.49.99	---- Lain-lain	
64.	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :	
65.	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	
66.	ex. 1602.90.90	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI